

**RINGKASAN EKSEKUTIF
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2016**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat, tokoh masyarakat (penggiat lingkungan). Tim Penyusun dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 227 Tahun 2017.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki iklim yang cukup baik serta curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi bila musim panas tiba, termasuk daerah yang rawan kebakaran, posisinya yang berada pada daerah pesisir pantai rawan abrasi dan banyak terdapat sampah domestik yang sulit dikelola karena wilayah berada di daerah pasang surut, melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis maka penyusunan isu prioritas dilakukan melalui pendekatan metode *pressure state & response* dengan Isu prioritas dirumuskan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh 26 orang, sehingga isu prioritas yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. Abrasi pantai timur di kecamatan Sadu, akibat dari masuknya air laut ke daratan sehingga merusak tanaman milik masyarakat
- b. Sampah domestik di permukiman saat pasang surut berakibat bau busuk dan media perkembangan vektor penyakit,
- c. Kebakaran lahan pada lahan gambut yang berada di perkebunan masyarakat dan konsesi.

Tabel 1.
Abrasi Pantai Timur akibat air laut ke daratan

ISU PRIORITAS	PRESSURE	STATE	RESPONSE
Abrasi air laut ke daratan, mengakibatkan banyaknya tanaman masyarakat yang rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naiknya muka air laut mengikis daratan 2. Setiap tahun ada kenaikan air laut 	a. Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reboinisasi penanaman bakau 2. Peraturan baik tingkat pemerintah daerah

		<p>pinggir pantai</p> <p>b. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, karena terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar.</p> <p>c. Kehilangan tempat berkumpulnya ikan ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau</p>	<p>maupun pusat yang mengatur pelarangan penambangan pasir pantai secara besar besaran yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>3. Pemecah gelombang perlu dibuat di pesisir-pesisir karena dapat mengurangi kekuatan gelombang yang menerjang pantai.</p>
--	--	---	---

Tabel 3.
Analisis kebakaran lahan yang gambut berada di perkebunan masyarakat dan konsesi

ISU PRIORITAS	PRESSURE	STATE	RESPONSE
Kebakaran lahan gambut yang berada di perkebunan masyarakat dan konsesi	<ol style="list-style-type: none"> Over drained di lahan gambut Pemeliharaan tata kelola air belum baik (kelembagaan) Iklm panas/kering rawan kebakaran Tradisi dan budaya masyarakat membakar lahan sebagai pengganti 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas Udara :melebihi baku mutu yang ditetapkan Resiko bencana : penyakit ISPA, kecelakaan akibat jarak pandang menurun, ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Tata kelola air gambut Pemanfaatan lahan gambut sebagai budidaya Restorasi gambut AMDAL, UKL/UPL, SPPL Peraturan Karhutla

	pupuk dan pembukaan lahan dengan biaya murah		
--	--	--	--

Tabel 2
Sampah domestik permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

ISU PRIORITAS	PRESSURE	STATE	RESPONSE
Sampah domestik permukiman saat pasang surut	Warga belum maksimal membuang sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS). Warga lebih suka membuang sampah, langsung ke bawah kolong rumah yang menimbulkan bau tidak sedap, menjadi media perkembangan biakan vector, ada resiko penyakit menular akibat lingkungan.	Lingkungan sekitar rumah ada risiko menjadi penular penyakit. Ada risiko epidemi berbagai jenis penyakit, seperti DBD, diare, dan demam.	a. Konsep land consolidation (LC) penataan tata letak rumah, jalan, drainase dan fasilitas umum lainnya. b. Sarana TPS yang memadai c. Pembinaan ke masyarakat

Sampai tahun 2016 kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 15 personil, untuk menjalankan tugas ini dengan baik, membutuhkan tenaga sebanyak 35 orang, sehingga dalam menjalankan kegiatan melakukan kerjasama dengan OPD lain seperti Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K), sampai tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mempunyai staf fungsional bidang lingkungan, seperti fungsional dampak lingkungan madya, pengendali dampak lingkungan, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik pelaksanaan *good governance* yang meliputi partisipasi (*participation*), penegakan hukum 2 (*rule of*

law), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi kepentingan umum (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiviness*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi ke depan (*strategic vision*). Dituangkan dalam LAKIP sebagai media utama yang menuangkan kinerja instansi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi tawar (*bargaining power*) untuk mengurus utamakan isu lingkungan cara yang dilakukan dengan pendekatan langsung ke sasaran dilakukan kepada : kelompok (petani, nelayan, pengusaha) melalui jalinan hubungan kerjasama dengan Kaukus Lingkungan, dan organisasi kemasyarakatan melalui dialog, pendidikan dan pelatihan pelestarian lingkungan hidup. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan sebagai berikut :

Tabel 4.
Kegiatan lingkungan dalam kelestarian lingkungan
dengan kemitraan tahun 2016

No	Kegiatan	Telah dilaksanakan oleh kab. Tanjabtimur	Perlu bantuan pusat
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui diseminasi dan sosialisasi informasi tentang prosedur dan tata cara untuk kepentingan umum;		
2	Mengadakan dialog dan mendorong pembentukan kaukus lingkungan di DPRD		
3	Memberikan penghargaan kepada masyarakat dan mitra strategis		
4	Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat		
5	Menetapkan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol		

	masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;		
6	Pengakuan kelembagaan adat dan local dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam.		
7	mengadakan kerja sama dengan instansi pembina (misalnya, Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal pengajaran substansi lingkungan untuk anak sekolah), lembaga terkait (misalnya, Pramuka)		
8	memelihara hubungan yang intensif dengan Kaukus Lingkungan di DPR/DPRD melalui komunikasi berkala, penyampaian informasi lingkungan dan buku Laporan Tahunan Kualitas Lingkungan; penokohan anggota DPRD yang membela kepentingan pelestarian lingkungan		
9	melakukan kegiatan-kegiatan konservasi, pembinaan dan pendampingan masyarakat kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan rehabilitasi hutan.		

Ancaman utama dari perubahan iklim pada wilayah pesisir adalah kenaikan air laut dan abrasi, kemarau yang lebih kering dan panjang mengancam ketersediaan air bersih dan kebutuhan air untuk pertanian. Ketahanan pangan dan mata pencaharian penduduk akan terganggu. Karena sektor ini merupakan mayoritas bagi penduduk. Di wilayah pesisir, kesulitan air tanah dan kenaikan muka air laut akan memungkinkan air laut menyusup ke sumber-sumber air bersih. Naiknya permukaan laut akan menggenangi wilayah pesisir sehingga akan menghancurkan lahan pertanian dan kebun kelapa, kenaikan muka air laut setinggi 0,5 meter dan turunnya tanah. Penyebaran penyakit malaria dipicu karena terjadinya curah hujan di atas normal dan dipengaruhi juga oleh pergantian cuaca yang kurang stabil, mendorong perkembangbiakan nyamuk dengan cepat.

Tabel 5.
Inisiatif Terkait Dengan Isu Perubahan Iklim

No	Kegiatan	Telah dilaksanakan oleh kab. Tanjabtimur	Perlu bantuan pusat
1	Memanfaatkan sistim informasi iklim sehingga mampu menjadi perencanaan dalam mengelola resiko iklim		
2	Menyediakan dana sekaligus mengintegrasikan pertimbangan resiko iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah		
3	Memperkuat informasi dan pengetahuan untuk mengurangi resiko iklim sekarang dan masa yang akan datang melalui sosialisasi		
4	Tersedianya sumber daya dan pendanaan yang berasal dari dalam APBN untuk kegiatan adaptasi serta memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan pendanaan pusat		
5	Penghijauan dan reboisasi. Sedangkan Reboisasi atau rehabilitasi hutan lindung, wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipasif.		

Tabel 6
Kegiatan Green House, penanaman pohon dan pembuatan RTH di
kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	Pembangunan green house	SMPN 12 Tanjung Jabung Timur	SMPN 12 Tanjung Jabung Timur
2	Penanaman pohon	SMPN 12 Tanjung Jabung Timur	SMPN 12 Tanjung Jabung Timur
3	Pembuatan taman/RTH	SMPN 12 Tanjung Jabung Timur	SMPN 12 Tanjung Jabung Timur

Sumber : KPDL Kabupaten Tanjab Timur Tahun 2016

Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah terlindunginya kawasan konservasi dan kawasan lindung dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

Tabel 7.
Kegiatan perlindungan lingkungan dan konservasi
Sumber daya alam Tahun 2016

No	Kegiatan	Telah dilaksanakan oleh kab. Tanjabtimur	Perlu bantuan pusat
1	Perlindungan sumber daya alam dari kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali terutama kawasan pesisir pantai dari abrasi yang rentan terhadap kerusakan		
2	Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari kepunahan, termasuk spesies-spesies pertanian dan kerusakan mangrove		
3	Penyusunan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pemantauan dan pengelolaan sampah di lingkungan permukiman		
4	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi darat dan laut		
5	Penanggulangan dan pengendalian		

	kebakaran hutan dan lahan gambut		
6	Pemantapan pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung		
7	Penguatan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi		
8	Evaluasi lingkungan dan kawasan konservasi alam geologi untuk pelestarian lingkungan hidup		
9	Penyediaan TPA dengan konsep <i>sanitary land fill</i>		

Tabel 8
Program rehabilitasi dan pemulihan
sumber daya alam tahun 2016

No	Kegiatan	Telah dilaksanakan oleh kab. Tanjabtimur	Perlu bantuan pusat
1	Perencanaan dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai		
2	Reboisasi dan penghijauan		
3	Pembangunan hutan tanaman industri (HTI), kawasan konservasi dan lindung;		
4	Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove), Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir		
5	Pengkayaan (restocking) sumber daya perikanan dan biota air lainnya		

Tabel 9
Program pengembangan kapasitas pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup

No	Kegiatan	Telah dilaksanakan oleh kab. Tanjabtimur	Perlu bantuan pusat
1	Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat lokal dan adat		
2	Pengembangan peran serta		

	masyarakat (warga madani) dan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup		
3	Pengembangan tata nilai sosial yang berwawasan lingkungan		
4	Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya alam (hutan, air, tanah, pesisir, laut, dan mineral), termasuk sistem pengawasan oleh masyarakat.		
5	Pengembangan sistem pendanaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.		
6	Penetapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan.		
7	Penyiapan dan pendirian pusat produksi bersih lingkungan.		
8	Pengembangan dan peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan.		

Tabel 10
Program pengendalian pencemaran
Lingkungan hidup Tahun 2016

No	Kegiatan	Telah dilaksanakan oleh kab. Tanjabtimur	Perlu bantuan pemerintah pusat
1	Penetapan indeks dan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah.		
2	Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan.		
3	Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi		
4	Pemantauan yang kontinyu, serta pengawasan dan evaluasi baku mutu lingkungan.		
5	Pengendalian pencemaran kualitas udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.		

6	Pengendalian pencemaran kualitas air.		
7	Inventarisasi dan pengendalian pencemaran dari bahan-bahan perusak ozon (ozon depleting substances).		
8	Inventarisasi dan persiapan kegiatan melalui Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism).		
9	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber-sumber industri dan rumah sakit;		
10	Pengendalian pencemaran industri, pertambangan dan pertanian melalui berbagai mekanisme insentif dan disintesis kepada para pelaku.		
11	Pengembangan sistem penilaian kinerja lingkungan industry.		
12	Penanganan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse dan recycle).		
13	Peningkatan penyuluhan dan interpretasi lingkungan kepada masyarakat menuju budaya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.		
14	Peningkatan kinerja AMDAL		
15	Perbaikan manajemen penanganan kualitas udara perkotaan.		

Tabel 11
Program peningkatan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan Hidup.

No	Kegiatan	Telah dilaksanakan oleh kab. Tanjabtimur	Perlu bantuan pemerintah pusat
1	Penyusunan data dasar sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem.		
2	Penyusunan statistik bidang lingkungan hidup		
3	Pengembangan sistem jaringan laboratorium di daerah bidang lingkungan beserta perangkat		

	pendukungnya		
4	Pengembangan sistem deteksi dini terhadap kemungkinan bencana lingkungan		
5	Pengembangan sistem inventarisasi dan informasi SDA dan LH		
6	Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.		
7	Peningkatan akses informasi kepada masyarakat.		

Rencana tindak lanjut perlu melakukan kegiatan :

1. Restorasi gambut dengan pengelolaan tata kelola air, perlunya dukungan masyarakat dan perusahaan yang memegang izin konsesi.
2. Melakukan pemilihan ekosistem sebagai kawasan pelindung pantai, dilakukan dengan terpadu dan terencana sesuai dengan metode yang tepat pada wilayah yang memiliki potensi gelombang besar (Desa Sungai Cemara dan Sungai Kapas dan Sungai Jambat), guna mencegah terjadinya abrasi, perlu adanya pembangunan pemecah gelombang (*Breakwater*) dan perlu bantuan dana APBN.
3. Menekankan kepada SKPD terkait untuk meningkatkan pelayanan persampahan untuk masyarakat, sehingga sampah dapat terangkut dan dikelola dengan benar di TPA, agar pelayanan persampahan dapat dilayani di semua kecamatan perlu bantuan pendanaan pemerintah pusat dalam bentuk DAK.
4. Pengelolaan sampah domestik pemukiman dengan konsep 3R dan penyempurnaan pengelolaan sampah di TPA dengan metode *sanitary land fill*, perlu dukungan dana APBN dan sumber lain.
5. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu tenaga fungsional dengan kemampuan bidang lingkungan, seperti fungsional dampak lingkungan madya, pengendali dampak lingkungan, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).